



LAPORAN TAHUNAN BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT



2017

www.bandung.bpk.go.id



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

9 Anggota BPK



Hilal Djali
Anggota

Achmad Qosol
Anggota

Agung Purnama Sampurna
Anggota

Agus Eko Prasono
Anggota

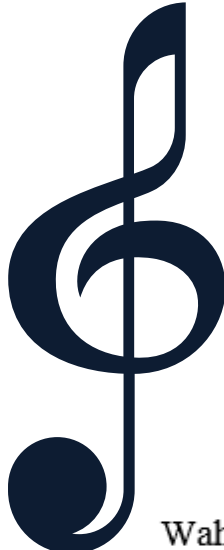
Muhammad Soerya Djengrana
Ketua

Badrullah Akbar
Wakil Ketua

Irena Yuzna
Anggota

Harry Asmar Adia
Anggota

Eddy Mulyadi Soepardi
Anggota



MARS & HYMNE BPK

MARS BPK

Wahai Sang Abdi Negara
 Badan Pemeriksa Keuangan
 Hayatilah Dan Amalkan Pengabdianmu
 Dengan Menjunjung Tinggi Independensi
 Integritas Dan Profesionalisme
 Memeriksa Pengelolaan Dan Tanggung
 Jawab
 Keuangan Negara
 Demi Bangsa Indonesia
 Tanah Air Tercinta
 Kami Siap Jiwa Dan Raga
 Mengabdikan Untuk Negara
 Tegar
 Takkan Gentar
 Menjaga Mengayomi Harta Negara
 Dengan Semangat Pancasila
(Kembali Ke Awal)
 Dengan Semangat Pancasila

HYMNE BPK

Kami Sang Abdi Negara
 Mengemban Tugas Mulia
 Untuk Tanah Air Tercinta
 Demi Bangsa Indonesia

 Kami Siap Jiwa Dan Raga
 Mengabdikan Untukmu Negara
 Tegar Takkan Pernah Gentar
 Menjaga Harta Negara
 Dengan Semangat Pancasila
 Kami Sang Abdi Negara
 Badan Pemeriksa Keuangan
 Bersumpah Dengan Hati Yang Kuat
 Selalu Ada Untukmu Indonesia

(Reff)

Kami Siap Jiwa Dan Raga
 Mengabdikan Untukmu Negara
 Tegar Takkan Pernah Gentar
 Menjaga Harta Negara
 Dengan Semangat Pancasila

(Back To Reff)

Dengan Semangat Pancasila (2x)

VISI

Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat

MISI

Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah secara bebas dan mandiri

Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas independen, dan professional

TUJUAN STRATEGIS

Meningkatkan manfaat hasil pemeriksaan dalam rangka mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan Negara

Meningkatkan pemeriksaan yang berkualitas dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah untuk mencapai tujuan Negara

RENCANA STRATEGIS 2016 S.D. 2020

Dalam rangka memberikan hasil pemeriksaan yang lebih baik dengan fokus kepada pemenuhan harapan dan kebutuhan pemangku kepentingan, penyempurnaan proses bisnis utama, peningkatan kapasitas kelembagaan dan kompetensi SDM, BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 399/K/X-XIII.2/9/2016 tanggal 2 September 2016 tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II di Lingkungan Badan Pemeriksa Keuangan Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat tersebut mengacu kepada Renstra BPK RI yang telah ditetapkan dengan Keputusan BPK RI Nomor 7/K/I-XIII.2/12/2015, tanggal 28 Desember 2015 dan Rencana Implementasi Renstra (RIR) Tahun 2016 – 2020 berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal BPK RI Nomor 375/K/X-XIII.2/8/2016 tanggal 22 Agustus 2016.

Renstra BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2016 – 2020 memuat visi, misi, tujuan strategis dan sasaran strategis BPK dalam melaksanakan mandat dan amanat Undang-Undang yaitu memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara.

ANGGOTA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN RI



KETUA BPK RI
Prof. Dr. Moermahadi Soerja Djanegara,
CA., CPA.



WAKIL KETUA BPK RI
Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., C.M.P.M.



ANGGOTA I BPK RI
Dr. Agung Firman Sampurna,
S.E., M.Si.



ANGGOTA II BPK RI
Dr. Agus Joko Pramono,
M.Acc., Ak., CA.



ANGGOTA III BPK RI
Achsanul Qosasi



ANGGOTA IV BPK RI
Prof. Dr. H. Rizal Djalil



ANGGOTA V BPK RI
Ir. Isma Yatun, M.T.



ANGGOTA VI BPK RI
Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A.



ANGGOTA VII BPK RI
Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi,
CFr.A., CA.

TUGAS DAN WEWENANG ANGGOTA BPK

No.	Pimpinan BPK	Tugas dan Wewenang	Objek Tugas dan Wewenang
1.	Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: ➤ pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua; ➤ tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK; ➤ hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri; ➤ pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Wakil Ketua; dan ➤ pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
2.	Wakil Ketua (merangkap Anggota)	Melaksanakan: ➤ pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua; ➤ pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, dan Inspektorat Utama; ➤ proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan; ➤ pembinaan pemeriksaan investigatif bersama dengan Ketua; dan ➤ pembinaan tugas Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.	Pelaksana BPK dan para pemangku kepentingan
3.	Anggota I	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ➤ memberikan pengarahan pemeriksaan investigatif	➤ Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan; ➤ Kementerian Luar Negeri; ➤ Kementerian Hukum dan HAM; ➤ Kementerian Pertahanan; ➤ Kementerian Perhubungan; ➤ Kejaksaan RI; ➤ Kepolisian Negara RI; ➤ Badan Intelijen Negara; ➤ Badan Narkotika Nasional; ➤ Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika; ➤ Lembaga Ketahanan Nasional; ➤ Lembaga Sandi Negara; ➤ Komnas HAM; ➤ Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

			Pidana Korupsi; ➤ KPU (termasuk KPU Daerah Prov/Kab/Kota); ➤ Badan SAR Nasional; ➤ Badan Nasional Penanggulangan Terorisme; dan ➤ Badan Pengawas Pemilihan Umum, ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
4.	Anggota II	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ➤ memberikan pengarah pemeriksaan investigatif	➤ Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian; ➤ Kementerian Keuangan; ➤ Kementerian Perdagangan; ➤ Kementerian Perindustrian; ➤ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS ➤ Kementerian Koperasi dan UKM; ➤ Badan Koordinasi Penanaman Modal; ➤ Badan Pusat Statistik; ➤ Bank Indonesia; ➤ Otoritas Jasa Keuangan; ➤ Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan; ➤ PT Perusahaan Pengelola Aset (termasuk pengelolaan aset-aset eks BPPN oleh Kemenkeu); ➤ Lembaga Penjamin Simpanan; ➤ Badan Standardisasi Nasional; ➤ Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; dan ➤ Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
5.	Anggota III	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ➤ melaksanakan koordinasi pemeriksaan investigatif	➤ MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY; ➤ Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan; ➤ Kementerian Sekretariat Negara; ➤ Sekretariat Kabinet ➤ Kementerian Sosial; ➤ Kementerian Pariwisata; ➤ Kementerian Ketenagakerjaan; ➤ Kementerian Komunikasi dan Informatika;

			➤ Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi; ➤ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak; ➤ Kementerian Pemuda dan Olahraga; ➤ Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; ➤ Kementerian Agraria dan Tata Ruang; ➤ Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi; ➤ Badan Pengawas Tenaga Nuklir; ➤ Badan Tenaga Nuklir Nasional; ➤ Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi; ➤ Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia; ➤ Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional; ➤ Perpustakaan Nasional RI; ➤ Badan Nasional Penanggulangan Bencana; ➤ Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan Pegawai Negeri Sipil; ➤ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional; ➤ Badan Kepegawaian Negara; ➤ Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan; ➤ Lembaga Administrasi Negara; ➤ Arsip Nasional RI; ➤ Pusat Pengelolaan Komplek Gelora Bung Karno Jakarta; ➤ Pusat Pengelolaan Komplek Kemayoran; ➤ Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja; ➤ Lembaga Penyiaran Publik RRI; ➤ Lembaga Penyiaran Publik TVRI; ➤ Taman Mini Indonesia Indah; ➤ Badan Informasi Geospasial; ➤ Ombudsman RI; ➤ Badan Pertanahan Nasional; ➤ Badan Ekonomi Kreatif; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
6.	Anggota IV	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan ➤ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif	➤ Kemenko Bidang Kemaritiman; ➤ Kementerian Pertanian; ➤ Kementerian Kelautan dan Perikanan; ➤ Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

			➤ Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat; ➤ Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan; ➤ Badan Pengatur Hilir Migas; ➤ Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
7.	Anggota V	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan ➤ memberikan pengarah pemeriksaan investigatif	➤ Kementerian Dalam Negeri; ➤ Kementerian Agama; ➤ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Sabang; ➤ Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas Batam; ➤ Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura; ➤ Badan Nasional Pengelola Perbatasan; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I, yang terdiri atas:
			➤ Provinsi Aceh; ➤ Provinsi Sumatera Utara; ➤ Provinsi Sumatera Barat; ➤ Provinsi Riau; ➤ Provinsi Kepulauan Riau; ➤ Provinsi Jambi; ➤ Provinsi Sumatera Selatan; ➤ Provinsi Bengkulu; ➤ Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; ➤ Provinsi Lampung; ➤ Provinsi Banten; ➤ Provinsi Jawa Barat; ➤ Provinsi DKI Jakarta; ➤ Provinsi Jawa Tengah; ➤ Provinsi DI Yogyakarta; ➤ Provinsi Jawa Timur; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.
8.	Anggota VI	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah; dan	➤ Kementerian Kesehatan; ➤ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; ➤ Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan);

		➤ memberikan pengarahannya pemeriksaan investigatif	➤ Badan Pengawas Obat dan Makanan; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas. Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II, yang terdiri atas: ➤ Provinsi Bali; ➤ Provinsi Nusa Tenggara Barat; ➤ Provinsi Nusa Tenggara Timur; ➤ Provinsi Kalimantan Barat; ➤ Provinsi Kalimantan Tengah; ➤ Provinsi Kalimantan Selatan; ➤ Provinsi Kalimantan Timur; ➤ Provinsi Kalimantan Utara; ➤ Provinsi Sulawesi Barat; ➤ Provinsi Sulawesi Selatan; ➤ Provinsi Sulawesi Tengah; ➤ Provinsi Sulawesi Tenggara; ➤ Provinsi Gorontalo; ➤ Provinsi Sulawesi Utara; ➤ Provinsi Maluku; ➤ Provinsi Maluku Utara; ➤ Provinsi Papua; ➤ Provinsi Papua Barat; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas
9.	Anggota VII	➤ melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; ➤ pemeriksaan investigatif	➤ Kementerian Badan Usaha Milik Negara; ➤ Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas); ➤ Badan Usaha Milik Negara dan anak perusahaan; ➤ Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan; ➤ Lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut di atas.

DAFTAR ISI

BAGIAN 1

Halaman	1 Mars dan Hymne BPK
	2 Visi, Misi, Dalam Tujuan Strategis,
	3 Rencana Strategis 2016 s.d. 2020
	4 Anggota BPK RI
	5 Tugas dan wewenang anggota BPK

BAGIAN 2

Halaman	12 Pengantar Kepala Perwakilan
Tentang Perwakilan	
	14 Struktur Organisasi
	15 Profil Pejabat Struktural
	18 Peta Strategi Perwakilan Jawa Barat
	19 Sasaran Strategis, IKU, dan Target IKU

BAGIAN 3

Halaman	23 Grafis Sumber Daya Manusia
	27 Kinerja Perwakilan
	28 Anggaran dan Realisasi
	29 Rencana dan Realisasi Pemeriksaan
	30 Sarana dan Prasarana Perwakilan
	31 Telaah Hukum Perwakilan
	32 Tindak Lanjut Rekomendasi BPK
	33 Pusat Informasi dan Komunikasi Jabar

BAGIAN 4

Penutup	
Kaleidoskop	





**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT**



Donor Darah Peringatan HUT BPK Ke-70

Pengantar Kepala Perwakilan



Arman Syifa, SST, MAcc, Ak.

Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Salam sejahtera bagi kita semua,

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karuniaNya berkat izinya BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat dapat menyusun Laporan Kinerja BPK Perwakilan Jawa Barat Tahun 2017, yang merupakan laporan atas pencapaian kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat selama tahun 2017.

Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2017 ini merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban Perwakilan Provinsi Jawa Barat sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Negara dalam memenuhi kewajiban pertanggungjawabannya atas tugas pokok dan fungsi dalam mengelola segala sumber daya yang dimiliki.

Pengukuran Kinerja Tahun 2017 dilakukan berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK). Dalam PK tersebut tercantum target-target Indikator Utama Kinerja (IKU) yang harus dicapai oleh Perwakilan Provinsi Jawa Barat dalam Tahun 2017. Dalam pelaksanaannya, kami telah berusaha secara maksimal dengan memanfaatkan seluruh sumber daya, baik sumber daya manusia, keuangan serta sarana dan prasarana kerja untuk dapat melaksanakan seluruh kegiatan yang telah kami rencanakan guna mencapai target IKU yang telah ditetapkan.

Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berperan serta dalam penyusunan laporan tahunan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017. Semoga bermanfaat.

Bandung, Januari 2018

Kepala Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Arman Syifa



BADAN PEMERIKSA KEUANG
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

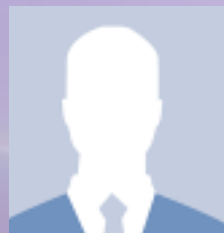
Gowes JABAR

STRUKTUR ORGANISASI



ARMAN SYIFA

Kepala Perwakilan



**Pejabat
Fungsional
Pemeriksa**



ARI ENDARTO

**Kepala Subauditorat
Jabar I**



SETYO PRAYITNO

**Kepala Subauditorat
Jabar II**



YOPHI SETIAWAN

**Kepala Subauditorat
Jabar III**



TEGUH PRIYANTONO

**Kepala Sekretariat
Perwakilan**



DWI HENDIANTO

**Kasubbag. Humas
dan TU Kalan**



DONI ADI PRADANA

Kasubbag. Hukum



ANTHON M.

Kasubbag. SDM



ELLI HARTELI D.

Kasubbag. Keuangan



WAWAN HADIWAN

**Kasubbag. Umum
dan TI**

Profil Pejabat Struktural



ARMAN SYIFA
Kepala Perwakilan

Lahir di Garut, 4 April 1969 dan menyelesaikan pendidikan D-3 Akuntansi STAN pada tahun 1991, dan D-4 STAN pada tahun 1997, kemudian menyelesaikan pendidikan S-2 Magister Akuntansi (*Master of Accountancy*) Case Western Reserve University pada tahun 2001.

Memulai karier di BPK pada tahun 1990 sebagai Administrasi Umum pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Pernah menjadi Auditor Pelaksana dan Auditor Ahli Pertama serta Pemeriksa Madya pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Sub Auditorat dan sekarang menjabat sebagai Kepala Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Lahir di Magelang, 08 Juni 1969 dan bergabung dengan BPK RI pada tahun 1996. Pada tahun 1994 menyelesaikan pendidikan S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro, dan Pascasarjana Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Jakarta, 9 Desember 2009. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi BUMN Industri Strategi-2 tanggal 13 September 2006, Kepala Seksi VII.B.3.1 tanggal 24 Agustus 2007, Kepala Sub Auditorat VII.D.3 tanggal 06 Maret 2009, menjabat sebagai Kepala Subauditorat Aceh III, tanggal 25 Maret 2013, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat I pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



ARI ENDARTO
Kepala Subauditorat
Jabar I



SETYO PRAYITNO
Kepala Subauditorat
Jabar II

Lahir di Magetan pada tanggal 25 Maret 1964. Menyelesaikan pendidikan S-1 Manajemen di Universitas Taman Siswa pada tahun 1992 dan S-2 Manajemen di Universitas Budi Luhur pada tahun 2006. Memulai karier di BPK pada tahun 1993 sebagai Administrasi Umum pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi Mabes Polri & BNN pada Auditorat Keuangan Negara I, Kepala Seksi I.B.3.3 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Sub Auditorat I.C.3 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan sejak akhir bulan Januari 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat II.

Lahir di Jakarta pada tanggal 2 Desember 1973. Menyelesaikan D-3 Akuntansi di Sekolah Tinggi Akuntansi Negara pada tahun 1996, S-1 Akuntansi di Universitas Brawijaya pada tahun 2001 dan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Indonusa Esa Unggul pada tahun 2016. Memulai karier di BPK pada tahun 1999 sebagai Administrasi Umum pada Auditorat Utama Keuangan Negara I. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Ketua Tim Senior pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Kepala Seksi I.B.3.1 pada Auditorat Utama Keuangan Negara I, Pengendali Teknis pada Subauditorat Jabar II BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subauditorat Jawa Barat III pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



YOPHI SETIAWAN
Kepala Subauditorat
Jabar III



TEGUH PRIYANTONO
Kepala Sekretariat
Perwakilan

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 30 Maret 1962. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ekonomi Perusahaan di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta pada tahun 1988. Memulai karier di BPK pada tahun 1993 sebagai Administrasi Umum di Biro Kepegawaian pada Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Jabatan yang pernah dipegang sebelumnya adalah Kepala Seksi Komando Utama TNI AD pada Auditorat Keuangan Negara I, Kepala Sub Bidang Pengawasan Khusus pada Inspektorat Utama Pengawasan Intern dan Khusus, Kepala Sub Bidang II.A.2 pada Inspektorat Utama, Kepala Bidang I.C pada Inspektorat Utama, Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur, dan sejak akhir bulan Januari 2018 sampai sekarang menjabat sebagai Kepala Sekretariat Perwakilan pada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Lahir di Jakarta pada 26 November 1976. Menyelesaikan pendidikan S-1 Hukum di Universitas Diponegoro pada tahun 2000. Memulai karier di BPK pada tahun 2003 sebagai Administrasi Umum di Biro Hukum dan Perundang-undangan pada Sekretariat Jenderal BPK RI. Jabatan yang pernah diemban sebelumnya sebagai Kepala Subbagian SDM di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Humas dan Tata Usaha Kepala Perwakilan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



DWI HENDIANTO
Kasubbag. Humas
dan TU Kalan



DONI ADI PRADANA
Kasubbag. Hukum

Lahir di Jakarta pada tanggal 15 Juni 1968. Menyelesaikan S-1 Ilmu Hukum di Universitas Pancasila pada tahun 1993 dan S-2 Manajemen di STIE IGI pada tahun 2000. Memulai karier di BPK pada tahun 1996 sebagai Administrasi Umum pada Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal BPK RI di Jakarta. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan Provinsi DKI Jakarta, Kepala Sub Bagian Hukum dan Humas di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah, Kepala Subbagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Tengah dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Hukum di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Lahir di Palembang pada tanggal 16 Mei 1981. Menyelesaikan pendidikan S-1 Teknik Pertambangan di Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2004. Memulai karier di BPK pada tahun 2007 sebagai Auditor Ahli Pertama pada Auditorat Utama Keuangan Negara VII BPK RI. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Subbagian Sekretariat Wakil Ketua pada Biro Setpim BPK RI, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Sumber Daya Manusia di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



ANTHON M
Kasubbag. SDM



ELLI HARTELI D.
Kasubbag. Keuangan

Lahir di Bandung pada 8 April 1964. Menyelesaikan pendidikan S-1 Akuntansi di Universitas Padjajaran pada tahun 1988. Memulai karier di BPK pada tahun 1990 sebagai Administrasi Umum pada Oditorat B, BPK RI. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Sub Bagian Verifikasi, Kepala Sub Bagian Pembukuan, Kepala Subagian Akuntansi I, Kepala Subbagian Akuntansi dan Pelaporan I di Biro Keuangan pada Sekretariat Jenderal BPK RI dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Keuangan di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.

Lahir di Bandung pada tanggal 4 Juli 1962. Menyelesaikan pendidikan S-1 Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Veteran Republik Indonesia pada tahun 1992. Memulai karier di BPK pada tahun 1996 sebagai Pemeriksa pada Perwakilan BPK RI di Makassar. Jabatan yang pernah diemban antara lain Kepala Subbagian Umum dan TI pada BPK Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau, Kepala Subbagian Sekretariat Wakil Ketua pada Biro Setpim, dan sekarang menjabat sebagai Kepala Subbagian Umum dan Teknologi Informasi di BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat.



WAWAN HADIWAN
Kasubbag. Umum
dan TI

Peta Strategi

Pemenuhan Kebutuhan Dan Harapan
Pemilik Kepentingan

SS1
Meningkatnya
Pemanfaatan
Hasil
Pemeriksaan

Pengelolaan Fungsi
Strategis

SS2
Meningkatkan
Kualitas
Perencanaan
Pemeriksaan

SS3
Meningkatkan
Kualitas Hasil
Pemeriksaan

SS4
Meningkatkan
Kualitas
Pemantaua
TLRHP dan
Kerugian
Negara

Pertumbuhan dan
Pembelajaran Organisasi

SS5
Meningkatkan
Kualitas
Organisasi di
Lingkungan
AKN V

SS6
Meningkatkan
Kompetensi
Pegawai di
Lingkungan AKN
V

Keuangan

SS7
Meningkatkan
Kinerja
Anggaran di
Lingkungan AKN
V

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian
Indikator Kinerja Utama

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja Utama dan Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Target	Kegiatan
SS 1. Meningkatkan Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan	IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan
	IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	
	IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	
	IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	
	IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	Merumuskan, mereviu dan menyiapkan bahan rumusan pendapat BPK
SS 2. Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan	IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	Mengarahkan dan mengevaluasi perumusan rencana kegiatan perwakilan
	IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	17%	berdasarkan rencana aksi serta tugas dan fungsi perwakilan
SS 3. Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan	IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi penyusunan program dan pengendalian kegiatan pemeriksaan
	IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	
	IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%	Mengarahkan dan mengevaluasi hasil pemeriksaan dalam rangka penyusunan IHPS
	IKU 3.4	Indeks Kepuasan <i>Auditee</i> atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,7	Mengarahkan dan mengevaluasi kegiatan pemeriksaan sesuai dengan standar pemeriksaan yang berlaku
	IKU 3.5	Ketetapan Waktu Penyampaian LHP	100%	
	IKU 3.6	Persentase LHP yang digugat dan BPK dinyatakan menang	100%	

SS 4. Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara	IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengkompilasi kegiatan
	IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	dan hasil pemantauan penyelesaian kerugian Negara/daerah
	IKU 4.3	Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	
SS 5. Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 5.1	Hasil Evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan TI
	IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	0	Mengarahkan dan mengevaluasi rencana aksi dan kinerja perwakilan
	IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	0%	
	IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	
	IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	Menyusun dan melaporkan hasil kegiatan berkala
	IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	Merumuskan, mereviu dan melaksanakan kegiatan humas
	IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	Mengarahkan, mengevaluasi dan memantau kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan sarpras
	IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	Melakukan Pembinaan dan Pengawasan kepada Pegawai
SS 6. Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	Mengarahkan, mengevaluasi dan mengendalikan kegiatan diklat pegawai
	IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	

SS 7. Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%	Mengarahkan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan layanan administrasi pemeriksaan
--	---------	--	-----	--

Tabel 3.1. Pencapaian Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat Tahun 2017

Indikator Kinerja Utama		Target	Realisasi	Skor Kinerja
IKU 1.1	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Pemeriksaan	65%	61,23%	94,20
IKU 1.2	Persentase Penyampaian LHP yang Mengandung Unsur Tindak Pidana ke IPH	100%	100%	100
IKU 1.3	Tingkat Pemenuhan Permintaan Perhitungan Kerugian Negara	100%	101%	101
IKU 1.4	Tingkat Pemenuhan Permintaan Pemberian Keterangan Ahli	100%	103%	103
IKU 1.5	Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang	1	1	100
IKU 2.1	Tingkat Konsistensi antara Rencana Pemeriksaan dan Pelaksanaan Pemeriksaan	85%	95%	105
IKU 2.2	Rasio Jumlah LHP Kinerja seluruh LHP	17%	18,92%	105
IKU 3.1	Pemenuhan <i>Quality Control</i> (QC) Pemeriksaan	100%	98,20%	98,20
IKU 3.2	Pemenuhan <i>Quality Assurance</i> (QA) Pemeriksaan	100%	80%	80
IKU 3.3	Tingkat Konsistensi dan Akurasi Penyajian LHP	100%		
IKU 3.4	Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK	3,70	4,31	105
IKU 3.5	Ketepatan Waktu Penyampaian LHP	100%	60,56%	60,56
IKU 3.6	Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang	100%	100%	100
IKU 4.1	Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan	100%	100%	100
IKU 4.2	Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	56	56	100
IKU 4.3	Ketetapan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang	100%	67,86%	67,86

IKU 5.1	Hasil Evaluasi Utama atas Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	A	A	100
IKU 5.2	Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi	80%	75,69%	94,61
IKU 5.3	Jumlah Usulan <i>Best-Practice</i>	8	8	100
IKU 5.4	Persentase Penyebaran <i>Best-Practice</i>	8%	8%	100
IKU 5.5	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Perwakilan Provinsi Jawa Barat	100%	100%	100
IKU 5.6	Persentase Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Bulanan	100%	100%	100
IKU 5.7	Jumlah <i>Media Relation</i> yang Dilaksanakan	2	4,9	105
IKU 5.8	Tingkat Pemenuhan Sarana dan Prasarana	95%	97,12%	102,23
IKU 5.9	Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin	100%	100%	100
IKU 6.1	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa	100%	88,52%	88,52
IKU 6.2	Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Teknis/Manajerial (Non Pemeriksa)	90%	87,27%	96,97
IKU 7.1	Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	82%	86,40%	105

BPK JABAR GOES TO SCHOOL - BALEENDAH



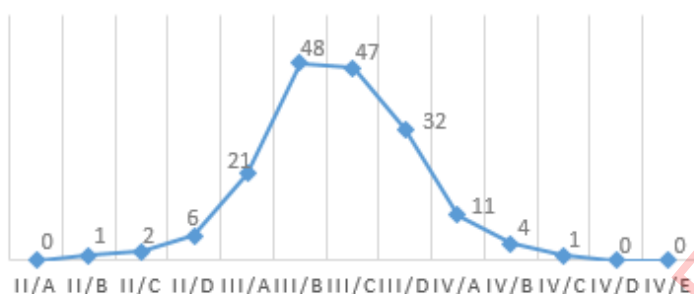
WORKSHOP SISTEM APLIKASI PEMERIKSAAN



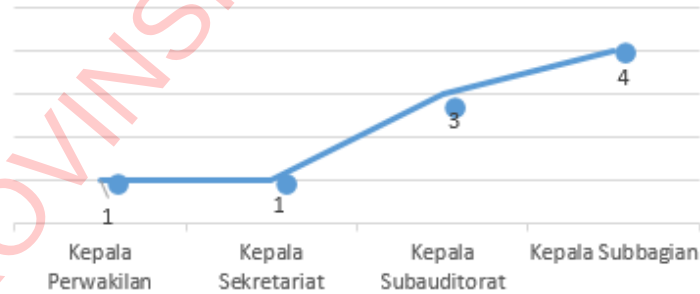
GRAFIS SUMBER DAYA MANUSIA BPK PROVINSI JAWA BARAT 2017

Berdasarkan data bezzeting Subbagian Sumber Daya Manusia BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat per 31 Januari 2017, jumlah pegawai tetap adalah sebanyak 173 orang, dengan komposisi laki-laki 110 dan perempuan 63 orang. Sedangkan jumlah pegawai tidak tetap adalah 25 orang

**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN GOLONGAN
KEPANGKATAN**



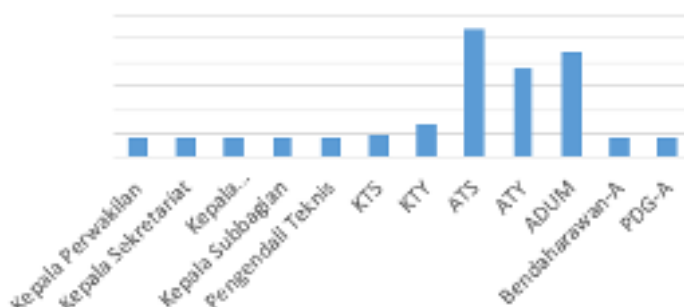
**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL**



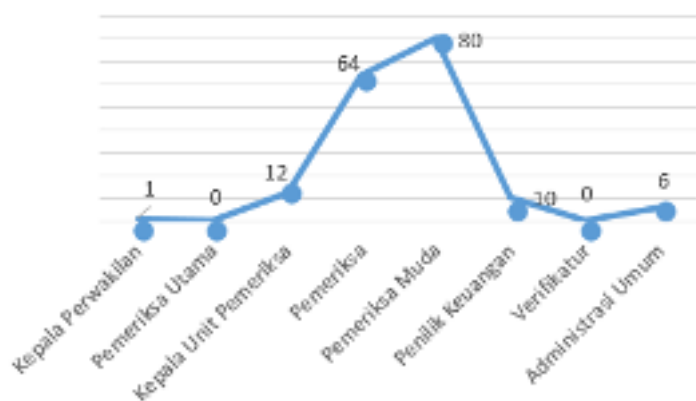
**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN USIA**



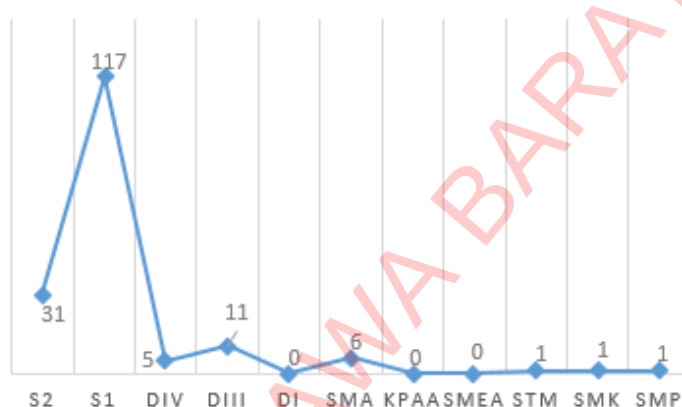
**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN JABATAN
STRUKTURAL, FUNGSIONAL, dan
ADM.UMUM**



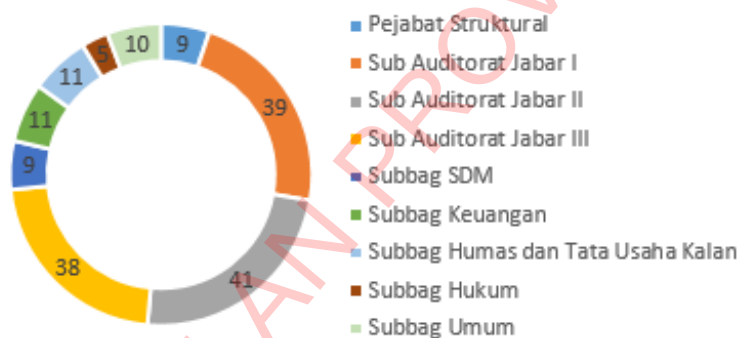
**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN JABATAN TERTENTU**



**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN PENDIDIKAN**



**STATISTIK PEGAWAI TETAP
BERDASARKAN UNIT KERJA
PERWAKILAN**



KINERJA PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT 2017

Sesuai dengan berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksanaan BPK RI tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat terdiri dari:

1. Sub Auditorat Jawa Barat I |

Sub Auditorat Jawa Barat I, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Pemerintah Kabupaten Bandung, Kabupaten Sukabumi, Kota Cimahi, Kota Bandung, Kota Sukabumi, dan Kabupaten Bandung Barat serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

2. Sub Auditorat Jawa Barat II

Sub Auditorat Jawa Barat II, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Ciamis, Kota Banjar, Kabupaten Kuningan, Kabupaten Majalengka, Kabupaten Cirebon, Kota Cirebon, dan Kabupaten Sumedang, serta BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut.

3. Sub Auditorat Jawa Barat III

Sub Auditorat Jawa Barat III, mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada pemerintah Kabupaten Subang, Kabupaten Indramayu, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Pangandaran, Kota Bogor, Kota Bekasi, dan Kota Depok serta BUMD dan lembaga

4. Sekretariat Perwakilan

Mempunyai tugas menyelenggarakan dan mengkoordinasikan dukungan administrasi, hukum, hubungan masyarakat dan perpustakaan, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat. Sekretariat Perwakilan membawahi Subbag Humas dan Tata Usaha, Subbag SDM, Subbag Keuangan, Subbag Umum dan Teknologi Informasi dan Subbag Hukum.

ANGGARAN DAN REALISASI

Pada Tahun 2017, Perwakilan memperoleh pagu anggaran sebesar Rp. 43.070.557.000,00 dan sampai dengan bulan Desember 2017 telah direalisasikan sebesar Rp 39.280.105.044,00 (91,20%). Secara rinci, perbandingan anggaran dan realisasi tersebut tersaji sebagai berikut.

Realisasi tersebut dalam IKU 7.1 Tentang Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan

Kegiatan		Anggaran	Realisasi	Persentase (%)
1	Pemeriksaan Keuangan Negara dan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara	23.275.726.000,00	20.598.033.886,00	88,50%
2	Pelayanan Kesekretariatan, Kehumasan dan Kerjasama Luar Negeri	1.310.891.000,00	1.167.693.984,00	89,08%
3	Manajemen Sumber Daya Manusia	12.357.760.000,00	11.703.434.627,00	94,71%
4	Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara	608.152.000,00	606.099.999,00	99,66%
5	Pengelolaan Sarana dan Prasarana serta Layanan Umum	5.518.028.000,00	5.204.842.548,00	94,32%
Total anggaran		43.070.557.000,00	39.280.105.044,00	91,20%

Perwakilan Provinsi Jawa Barat mencapai skor 105 atau melebihi target yang ditetapkan sebesar 80%. Berikut tren persentase realisasi pencapaian IKU 7.1 dalam tiga tahun terakhir

IKU	Target Tahun					Realisasi Tahun 2016
	2016	2017	2018	2019	2020	
7.1. Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran di Lingkungan Perwakilan Provinsi Jawa Barat	80%	80%	85%	85%	90%	91,40%

RENCANA DAN REALISASI PEMERIKSAAN

No	Jenis Pemeriksaan	Rencana Pemeriksaan	Realisasi Pemeriksaan	Keterangan
1.	LK	28	28	* 28 Pemeriksaan LKPD
2.	Kinerja	16	16	* 6 Pemeriksaan SAP Akrua : Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kota Banjar, Kota Tasikmalaya, Kab. Bogor, dan Kota Depok. * 3 Pemeriksa AB Non Perpipaan : Kab. Sukabumi, Kab. Sumedang, Kab. Cianjur * 1 Pemeriksaan BPD Bank Jabar Banten * 2 Pemeriksaan Program Kemiskinan : Provinsi Jawa Barat dan Kab. Garut. * 4 Pemeriksaan Manajemen Aset : Provinsi Jawa Barat, Kab. Cirebon, Kab. Karawang, Kota Bekasi
3.	PDDT	15	15	* 4 Pemeriksaan Pendapatan Daerah: Kota Bandung, Kota Cirebon, Kab. Subang, dan Kab. Bekasi * 1 Pemeriksaan Pendapatan dan Biaya PT. Jasa Sarana * 9 Pemeriksaan Belanja Daerah : Provinsi Jawa Barat, Kab. Bandung, Kota Banjar, Kab. Cirebon, Kab. Garut, Kab. Pangandaran, Kab. Bogor, Kab. Cianjur, dan Kab. Purwakarta * 1 Pemeriksaan Manajemen Aset : Kota Cirebon
4.	Bantuan Parpol	28	28	* 28 Pemeriksaan Bantuan Parpol
	Jumlah	87	87	

SARANA DAN PRASARANA PERWAKILAN

Saldo Persediaan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2017 sebesar Rp215.696.351,00 (dua ratus lima belas juta enam ratus sembilan puluh enam ribu tiga ratus lima puluh satu rupiah) jumlah tersebut terdiri dari saldo awal sebesar Rp183.987.780,00 (seratus delapan puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu tujuh ratus delapan puluh rupiah) dan total mutasi persediaan selama periode laporan sebesar Rp31.708.571,00 (tiga puluh satu juta tujuh ratus delapan ribu lima ratus tujuh puluh satu rupiah).

Jumlah tersebut dapat dirinci sebagai berikut :

Uraian		Saldo Awal (Rp)	Mutasi (Rp)	Saldo Akhir (Rp)
117111	Barang Konsumsi	114.736.879,00	46.962.335,00	161.699.214,00
117113	Barang Untuk Pemeliharaan	57.000,00	-57.000,00	0,00
117114	Suku Cadang	1.166.501,00	3.498.099,00	4.664.600,00
117131	Bahan Baku	965.100,00	-965.100,00	0,00
117199	Persediaan Lainnya	67.062.300,00	-17.729.763,00	49.332.537,00
JUMLAH		183.987.780,00	31.708.571,00	215.696.351,00

Total nilai barang persediaan yang dalam kondisi rusak dan usang adalah sebesar Rp0,00 (nol rupiah) yang terdiri dari barang persediaan dengan kondisi rusak senilai Rp0,00 (nol rupiah) dan kondisi usang senilai Rp0 (nol rupiah).

Berikut Perbandingan antara Nilai BMN yang disajikan dalam laporan barang dan laporan keuangan pada Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan per 31 Desember 2017 per akun neraca.

No	Uraian Neraca	Laporan Barang	Laporan Keuangan
1.	Persediaan	215.696.351,00	215.696.351,00
2.	Tanah	165.777.099.000,00	165.777.099.000,00
3.	Peralatan dan Mesin	34.594.944.820,00	34.594.944.820,00
4.	Gedung dan Bangunan	59.931.852.000,00	59.931.852.000,00
5.	Jalan, Irigasi dan Jaringan	14.114.128.307,00	14.114.128.307,00
6.	Aset Tetap Lainnya	186.993.617,00	186.993.617,00
7.	KDP	0,00	0,00
8.	Aset Tak Berwujud	680.634.440,00	680.634.440,00
9.	Aset Lain – lain*)	1.056.834.440,00	1.056.834.440,00
Total		275.877.548.535,00	275.877.548.535,00

*) Aset lain-lain pada laporan barang adalah nilai BMN yang dihentikan penggunaannya dari operasional pemerintah.

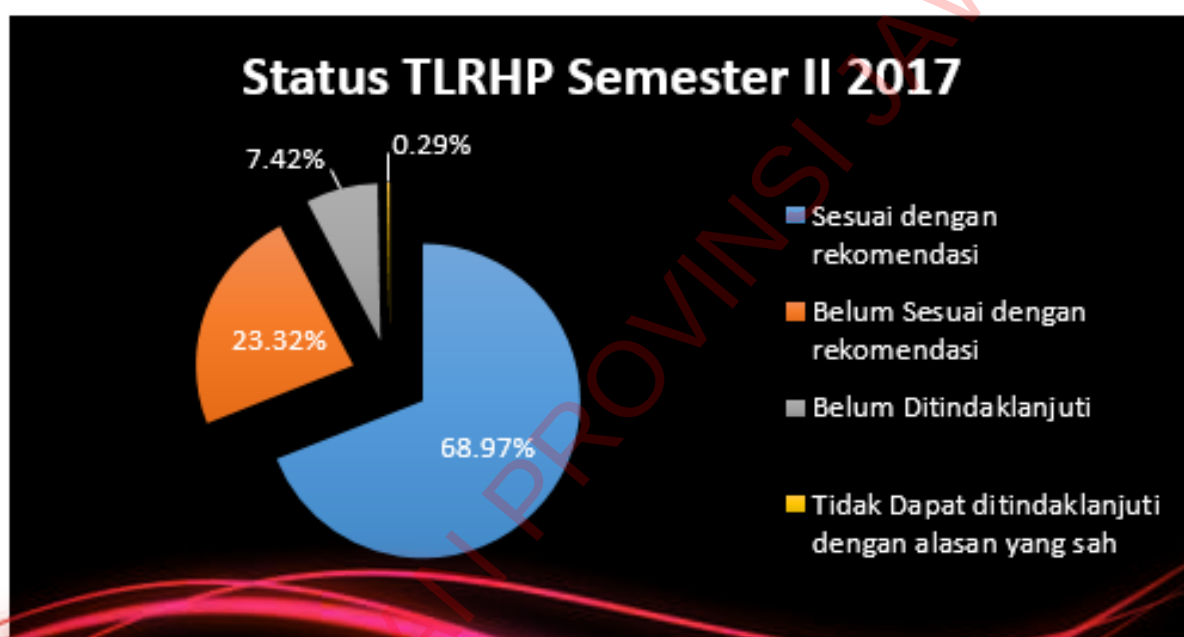
TELAAH HUKUM PERWAKILAN

Permintaan Pendapat Hukum

No.	Topik	Asal Surat	
1.	Pendapat Hukum atas permasalahan "Biaya Perjalanan Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD".	32/ND/XVIII.BDG.1.5/03/2017 tanggal 7 Maret 2017	Ketua Tim Interim LKPD Kabupaten Bandung Tahun 2016
2.	Pendapat Hukum atas Temuan Pemeriksaan LKPD pada Pemerintah Kota Bogor TA 2016 berjudul Pendapatan Retribusi IMB, HO, dan PPTR pada Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal (BPPTPM) Kota Bogor sebesar Rp2.223.424.202,00 Tidak Disetorkan Ke Kas Daerah.	97/ND/XVIII.BDG.1.5/08/2017 tanggal 5 September 2017	
3.	Pendapat atas Konsep LHPIA dugaan TPK pada Pekerjaan Pembangunan GOR Sport Hall Kabupaten Garut TA 2016	105/ND/XVIII.BDG.1.5/10/2017 tanggal 2 Oktober 2017	Kasubaud Jabar II
4.	Pendapat Hukum atas Temuan Pemeriksaan Pengelolaan Aset Tetap Pemerintah Kota Cirebon Belum Memadai Dalam LHP LKPD Pemerintah Daerah Kota Cirebon TA 2015.	104/ND/XVIII.BDG.1.5/10/2017 tanggal 2 Oktober	
5.	Pendapat atas Pemungutan Retribusi Izin Gangguan Berdasarkan Perda Kabupaten Cirebon Nomor 4 Tahun 2012	141/ND/XVIII.BDG.1.5/12/2017 tanggal 15 Desember 2017	Kasubaud Jabar II

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BPK

No.	Status Tindak Lanjut atas Rekomendasi BPK	Jumlah	%
1.	Sesuai dengan rekomendasi	14.148	68,98%
2.	Belum Sesuai dengan rekomendasi	4.783	23,32%
3.	Belum Ditindaklanjuti	1.521	7,42%
4.	Tidak Dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah	60	0,29%



PUSAT INFORMASI DAN KOMUNIKASI JABAR

Permintaan Informasi Publik 2017			
1	Klasifikasi Pemohon		
	Mahasiswa	115	73,72%
	Instansi (APH, Kanwil, BPKP)	10	6,41%
	Parpol	0	0%
	Perseorangan	8	5,13%
	Media	7	4,49%
	LSM	16	10,25%
2	Data yang Dimohonkan		
	LHP	123	78,85%
	Non LHP	33	21,15%
3	Mekanisme Permohonan		
	Surat	33	21,15%
	Datang Langsung	123	78,85%
4	Pemenuhan Data yang Dimohonkan		
	Dipenuhi	155	99,35%
	Ditolak	1	0,65%

Pengaduan Masyarakat 2017			
1	Klasifikasi Pengadu		
	Individu	11	31,43%
	Badan Hukum	13	37,14%
	Kelompok Orang	11	31,43%
2	Topik Pengaduan		
	Permohonan Pemeriksaan	5	14,28%
	Informasi Penyimpangan	28	80%
	LHP	0	0%
	Kepegawaian	1	2,86%
	Informasi BPK yang di publikasikan	0	0%
	Lain – lain	1	2,86%
3	Mekanisme Pengaduan		
	Surat	34	97,2%
	Datang Langsung	1	2,8%
4	Tindak Lanjut		
	Proses	0	0%
	Ditolak	0	0%
	Selesai	35	100%

PUBLIKASI

Jumlah kegiatan <i>media relations</i>	5 Kegiatan
Jumlah pengaduan masyarakat	35 surat/dokumen
Jumlah permohonan informasi publik	156 permohonan



UPACARA 17 AGUSTUS



JANUARI 2017





FEBRUARI 2017



MARET 2017





APRIL 2017





MEI 2017





JUNI 2017





JULI 2017





AGUSTUS 2017





SEPTEMBER 2017





OKTOBER 2017





NOVEMBER 2017





DESEMBER 2017



BPK PERWAKILAN PROVINSI JAWA BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat
Jl. Moch Toha No.164 Bandung 40243
Telp./Fax 022-5207294/022-52078928

www.bandung.bpk.go.id